



DIPASTIKAN TIDAK TERBAHAS DI DEWAN

Haryadi Terbitkan Perwal APBD-P

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akhirnya memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014. Langkah tersebut dilakukan setelah melihat kondisi waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pembahasan.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengungkapkan, Perwal menyangkut anggaran itu akan diterbitkannya pada pekan ini. "Kami perlu melakukan konsultasi dengan Pemda DIY dulu untuk teknisnya. Yang jelas akhir Oktober sudah saya teken," terangnya usai melakukan koordinasi bersama seluruh kepala dinas, Senin (27/10).

Haryadi melanjutkan, kegiatan belanja yang akan diatur dalam Perwal hanya yang bersifat mengikat dan wajib. Sedangkan usulan-usulan kegiatan yang direncanakan dalam APBD-P 2014, terpaksa akan ditangguhkan untuk tahun depan.

Molarnya pembahasan APBD-P ini juga tak bisa dilepaskan dari dinamika di internal DPRD Kota Yogyakarta. Terutama menyangkut penetapan alat kelengkapan dewan yang belum terwujud. Sehingga pembahasan anggaran otomatis belum bisa dilakukan. "Kami sangat menghargai proses yang terjadi di dewan. Sebelum Perwal diterbitkan, kami pun akan menyampaikan surat ke dewan," imbuhnya.

Penerbitan Perwal untuk kegiatan yang mendahului anggaran ini pun bukan yang pertama kalinya. Pada akhir 2013 lalu, tepatnya 31 Desember 2013, Pemkot juga melakukan hal sama karena APBD 2014 tidak terbahas tepat waktu.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengungkapkan, kegiatan yang sudah dipastikan akan diatur dalam Perwal ialah menyangkut honorarium. Terutama honor tenaga bantuan di lingkungan Pemkot, honor tambahan bagi guru tidak tetap serta honor tenaga kontrak di Terminal Giwangan. "Honor ketiga item itu besarnya Rp 9 miliar. Selain itu masih ada kegiatan lain seperti Jamkesda serta biaya listrik. Tapi teknisnya masih menunggu konsultasi dengan DIY," paparnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta yang juga Anggota Fraksi PAN, M Ali Fahmi mengaku, pihaknya memang mendorong Pemkot agar segera menerbitkan Perwal pengganti Perda APBD-P 2014. Menurutnya, jalinan komunikasi informal terkait penyusunan pimpinan alat kelengkapan dewan sudah tidak ada titik temu.

(Dhi)-a

Kegiatan yang akan diatur dalam Perwal pengganti Perda APBD-P 2014:

- Honorarium tenaga bantuan (naban) untuk tiga bulan
- Honorarium tambahan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT)
- Honorarium tenaga kontrak
- Tambahan alokasi Jamkesda
- Tambahan biaya listrik

Kegiatan yang diusulkan dalam APBD-P 2014 yang akhirnya gagal:

- Target Puskesmas jadi BLUD
- Revitalisasi lantai 2 dan 3 Pasar Beringharjo
- Serta kegiatan kemasyarakatan yang tersebar di tiap instansi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
DPDPK		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005